

LAKIP



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2017

BAB I

Pendahuluan

Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued yang sedang dihadapi organisasi).

1.1 Latar Belakang

Tuntutan masyarakat akan peran pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan merupakan kebutuhan masyarakat yang terkait dalam pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pelayanan sosial secara optimal, juga perlu dilaksanakan guna mengeliminasi berbagai persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan.

Berbagai masalah sosial kemasyarakatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dipandang sebagai bentuk interaksi dan dinamisasi sosial kemasyarakatan dan sangat diperlukan penanganan secara komprehensif, melalui sinergi berbagai program pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat.

Permasalahan sosial kemasyarakatan sangat membutuhkan koordinasi dan fasilitasi dalam penanganannya, antara lain dibidang kebudayaan, pemuda dan olahraga, yang tentunya akan melibatkan stakeholders yang relatif besar, mengingat besarnya lingkup tugas bidang sosial kemasyarakatan yang terjadi selama ini.

Disamping itu, sebagai daerah yang memiliki kekuatan adat dan budaya yang dilatarbelakangi oleh filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, maka pembangunan adat, budaya serta agama sangat membutuhkan penanganan yang sinergis dengan berbagai unsur.

Biro Bina Mental dan Kesra merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan rakyat sebagai unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas. Aturan yang mendasari pembentukannya adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Diktum Pertama Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 64 Tahun 2012 dinyatakan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Mandiri wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya sebagai wujud pertanggungjawaban atas produktivitas kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2015.

Biro Bina Mental dan Kesra adalah merupakan unsur staf Sekretariat Daerah dalam menunjang tugas-tugas Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra. Disamping itu, Biro Bina Mental dan Kesra di pimpin oleh Kepala Biro yang berkedudukan dibawah dan Bertanggungjawab kepada Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra.

Program kegiatan yang dilaksanakan Biro Bina Mental dan Kesra selama tahun 2017 di dasarkan atas tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021, Rencana Strategis Biro Bina Mental dan Kesra Tahun 2017-2021, Rencana Kinerja Tahun 2017, Penetapan Kinerja Tahun 2017, secara konsisten terus menerus dan berkesinambungan.

Penyusunan LAKIP ini semata-mata ditujukan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya bahwa Biro Bina Mental dan Kesra mempunyai komitmen dan tekad yang kuat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang berorientasi pada hasil baik berupa output maupun outcomes. Disamping itu penyusunan LAKIP Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 juga merupakan perwujudan prinsip transparan dan akuntabilitas yang merupakan aspek dan pilar penting dalam mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Bina Mental dan Kesra, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dibuat sebagai wujud dari akuntabilitas dan pertanggung jawaban kinerja Biro Bina Mental dan Kesra. Laporan ini juga merupakan wujud dari transparansi Biro Bina Mental dan Kesra dalam melaksanakan pembangunan bidang sosial, keagamaan, kesejahteraan masyarakat, kebudayaan dan pemuda dan olahraga.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Bina Mental dan Kesra, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- a) Sebagai sarana untuk menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kinerja kepada stakeholder.
- b) Sebagai sarana untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

1.3 Gambaran Umum Biro Bina Mental dan Kesra

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Biro Bina Mental dan Kesra merupakan unit SKPD yang langsung berada di bawah Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1.3.1 Tugas Pokok :

Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan pengoordinasian, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi bina mental, pengembangan generasi muda serta kesejahteraan rakyat.

1.3.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas dimaksud, Biro Bina Mental dan Kesra mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum bina mental, pengembangan generasi muda serta kesejahteraan rakyat;
- b) Penyelenggaraan pengoordinasi dan fasilitasi bina mental, pengembangan generasi muda serta kesejahteraan rakyat;
- c) Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi bina mental, pengembangan generasi muda serta kesejahteraan rakyat;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pergub No. 68 Tahun 2017 tentang

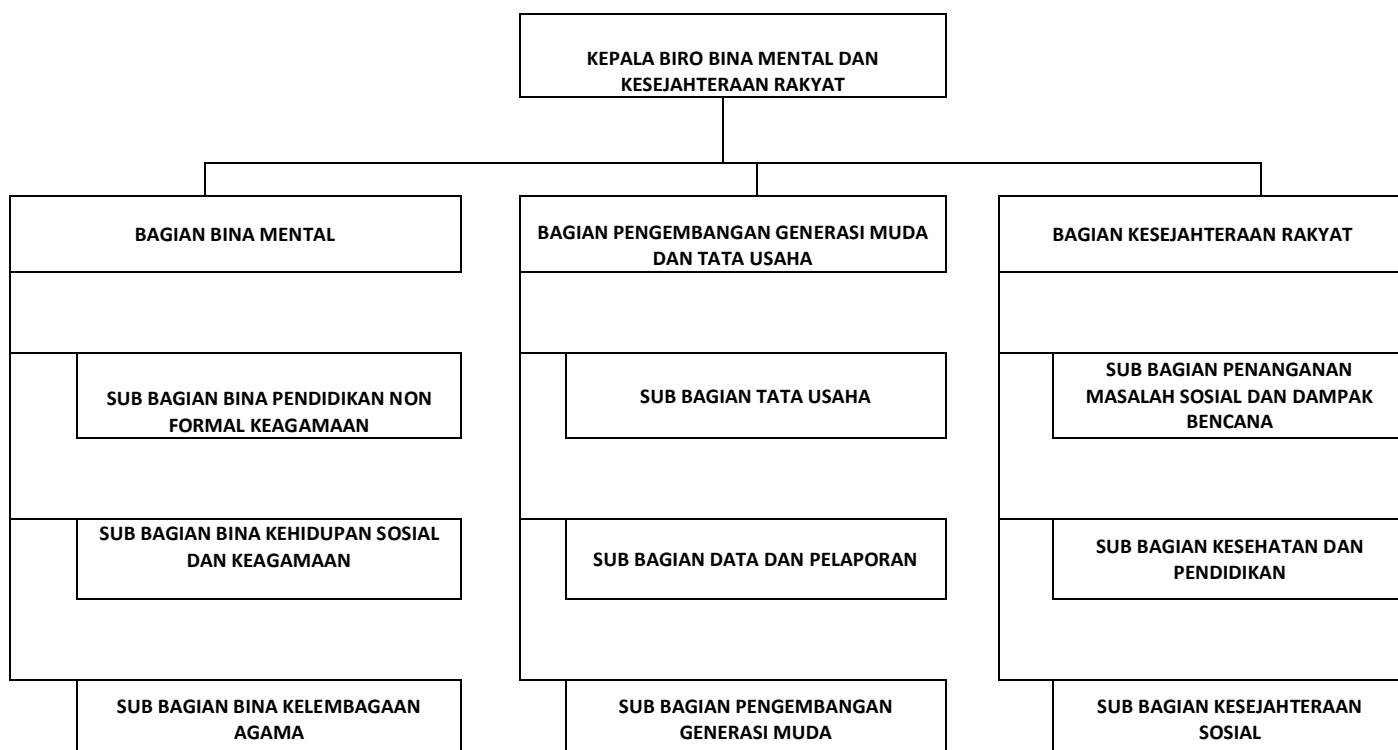
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Struktur Organisasi, Biro Bina Mental dan Kesra dibentuk dengan struktur :

1. Kepala Biro,
2. Bagian Bina Mental terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Bina Pendidikan Non Formal Keagamaan
 - b) Sub Bagian Bina Kehidupan Sosial dan Agama
 - c) Sub Bagian Bina Kelembagaan Agama
3. Bagian Pengembangan Generasi Muda dan Tata Usaha terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha
 - b) Sub Bagian Pengembangan Generasi Muda
 - c) Sub Bagian Data dan Pelaporan
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Penanganan Masalah Sosial dan Dampak Bencana
 - b) Sub Bagian Kesehatan dan Pendidikan
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial

1.3.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Kepala Biro hingga Kepala Sub Bagian pada Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan. Struktur Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Biro Bina Mental dan Kesra

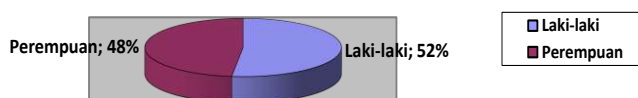


1.3.4 Sumber Daya Biro Bina Mental dan Kesra

1.3.4.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per Desember 2017 yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Biro Bina Mental dan Kesra berjumlah 54 orang. Komposisi pegawai tersebut terdiri dari 54 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan di uraikan berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 28 orang (51.85%) laki-laki dan 26 orang (48.15%) perempuan. Dari data tersebut dapat dikatakan antara jumlah pegawai laki-laki dan perempuan hampir seimbang dan hal ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Biro Bina Mental dan Kesra Setda Prov. Sumbar



Sumber : Subag Tata Usaha Biro Bina Mental dan Kesra Setda Prov. Sumbar

Komposisi Pegawai Biro Bina Mental dan Kesra berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Bina Mental dan Kesra Setda Prov. Sumbar Tahun 2015

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SLTP	-	0%
2	SLTA	17	31,48%
3	DIPLOMA III/D-3	6	11,12%
4	STRATA 1	23	42,59%
5	STRATA 2	8	14,81%
6	STRATA 3	-	0%
	JUMLAH	54	100%

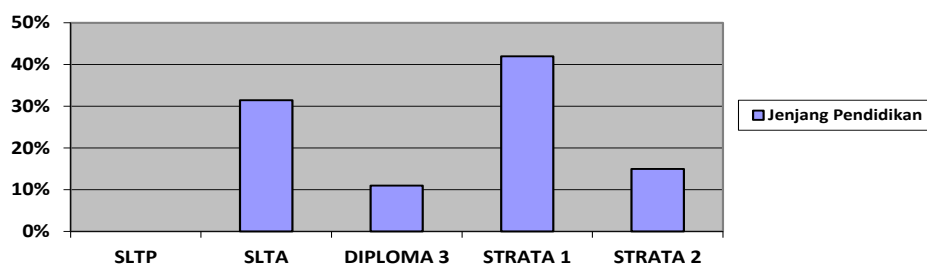
Sumber : Subag Tata Usaha Biro Bina Mental dan Kesra Setda Prov. Sumbar

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Biro Bina Mental dan Kesra karena lebih dari 68,52% pegawai sudah berpendidikan sarjana, namun sebanyak 31,48% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai dikelompokkan lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara

grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di bawah ini :

Gambar 1.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Biro Bina Mental dan Kesra Setda Prov. Sumbar



Sumber : Subag Tata Usaha Biro Bina Mental dan Kesra Setda Prov. Sumbar

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah :

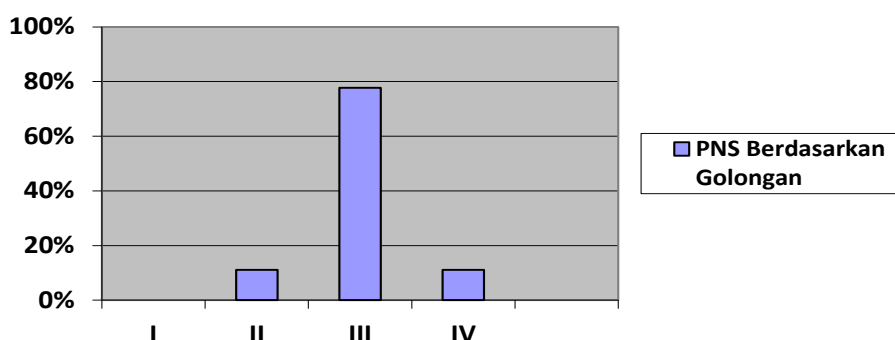
Tabel. 1.2
Daftar Golongan Pegawai
Biro Bina Mental dan Kesra Setda Prov. Sumbar Tahun 2018

NO	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Golongan I	0	0%
2	Golongan II	6	11.11%
3	Golongan III	42	77.78%
4	Golongan IV	6	11.11%
	Jumlah	54	

Sumber : Subag Tata Usaha Biro Bina Mental dan Kesra Setda Prov. Sumbar

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, ternyata 77.78% pegawai Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah golongan III. Apabila dibandingkan dengan komposisi kualifikasi pendidikan pegawai, maka sebagian besar pegawai yang berpendidikan SLTA telah memasuki golongan III yang berarti telah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun. Berikut jumlah PNS Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per golongan :

Gambar 1.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
pada Biro Bina Mental dan Kesra Setda Prov. Sumbar



Sumber : Subag Tata Usaha Biro Bina Mental dan Kesra Setda Prov. Sumbar

1.3.5 Anggaran

Pelaksanaan Program Kerja Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 didukung oleh Dana APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 31.155.440.874,- .

1.3.6 Inventarisasi Aset

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang miliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Nilai aset yang dikelola Biro Bina Mental dan Kesra per Desember 2018 sebesar Rp. 382.053.440.692,33 besaran aset yang dikelola per Desember 2018 digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Daftar Aset Biro Bina Mental dan Kesra Setda Prov. Sumbar
Per Desember 2018

NO	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG		JUMLAH HARGA (Rp)	SUB TOTAL (Rp)
				PERSIL	VOL/ JUMLAH		
1	01		GOLONGAN TANAH				95.003.478.000,00
		01	Tanah	1	75.490	95.003.478.000,-	
2	02		GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN				3.448.004.436,33
		02	Alat-alat Besar	-	1	89.700.000,00	
		03	Alat-alat Angkutan	-	4	853.047.000,00	
		06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	193	2.449.302.436,33	
		07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	-	3	55.955.000,00	
4	03		GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN				283.601.958.256,00
		00	Bangunan Gedung	1	0	283.601.958.256,0	
TOTAL HARGA							382.053.440.692,33

Sumber : Kartu Inventaris Barang Biro Bina Mental dan Kesra Setda Prov. Sumbar

1.3.7 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat masih memakai fasilitas ruangan aula kantor Gubernur.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki 4 Unit Kendaraan Dinas Operasional roda 4 dan 1 Unit Kendaraan Dinas Operasional dengan status pinjam pakai ke Baznas Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Dasar Hukum Penyusunan LAKIP

Dasar Hukum penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut :

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 29 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/68/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) 2018 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah :

- **BAB I** – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum tupoksi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pada Tahun 2018, dasar hukum dan sistematika penulisan LAKIP.
- **BAB II** – Perencanaan dan Perjanjian Kerja yang berisi Rencana Strategis, menjelaskan muatan rencana strategis Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2017-2021, RKT, PK Tahun 2018.
- **BAB III** – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja, pencapaian indikatornya dilaksanakan oleh Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan membahas Akuntabilitas Keuangan.
- **BAB IV** – Penutup, menjelaskan simpul menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kerja

Bab ini secara umum menjelaskan tentang arah kebijakan, program utama, strategi, program dan kegiatan, serta Rencana Strategis Implementasi Biro Bina Mental dan Kesra 2016-2021 yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Bina Mental dan Kesra, Rencana Kinerja Tahunan serta Penetapan Kinerja

2.1 Umum

Visi : “Terwujudnya Pembangunan Sosial Kemasyarakatan yang Berkesinambungan”.

Misi :

1. Terwujudnya pelayanan terbaik dalam Bidang Sosial Kemasyarakatan.
2. Terciptanya kehidupan masyarakat madani yang harmonis dan agamais.
3. Diwarisinya dan diamalkannya serta dilestarikannya nilai-nilai kearifan lokal dan budaya daerah.
4. Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, sejahtera dan produktif.

Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Bidang, sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan.
2. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat.
3. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan untuk memperkuat keberadaannya di masyarakat
4. Meningkatnya pemahaman, pengamalan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan daerah.
5. Meningkatnya koordinasi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan.

- Sasaran** :
1. Terwujudnya peningkatan pelayanan pada penyelenggaraan peribadatan agama .
 2. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat.
 3. Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi sumber daya manusia dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan.
 4. Terwujudnya koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan
 5. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan daerah
 6. Meningkatnya pengelolaan organisasi yang baik.

2.2 Strategi

Strategi yang disiapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Bina Mental dan Kesra adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan melalui peningkatan kualitas akses informasi, peran lembaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan.
2. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan ajaran agama sejak dini, penguatan, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lembaga pendidikan, sarana ibadah dan lembaga penunjang lainnya.
3. Meningkatnya Potensi dan prestasi SDM serta potensi lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan, pendidikan dan kesehatan serta lembaga kepemudaan.
4. Meningkatnya peran, kapasitas lembaga adat beserta penyelenggaranya dan keberadaan pemangku adat didalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
5. Meningkatnya koordinasi di bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan dalam rangka pengembangan kebijakan penyelenggaraan pembangunan

2.3 Arah Kebijakan

Selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat, maka arah kebijakan Biro Bina Mental dan Kesra adalah :

1. Peningkatan manajemen akses data dan informasi penyelenggaraan kegiatan.
2. Peningkatan pengelolaan sarana, prasarana penyelenggaraan kegiatan.
3. Penguatan dan pengembangan kelembagaan untuk mutu penyelenggaraan kegiatan.
4. Peningkatan manajemen lembaga pendidikan non formal keagamaan.
5. Peningkatan mutu penyuluh agama, tokoh agama serta pengelolaan sarana dan tempat ibadah.
6. peningkatan pengelolaan dan transparansi badan pengelola zakat, sedekah dan infak.
7. Peningkatan pembinaan terhadap SDM lembaga keagamaan.
8. Peningkatan pembinaan terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga sosial.
9. Pengembangan kurikulum ekstrakurikuler bidang pendidikan.
10. Peningkatan kompetensi pemangku adat.
11. Penguatan peran dan fungsi lembaga adat.
12. Penguatan fasilitasi dan koordinasi lembaga adat.
13. Peningkatan koordinasi penanganan masalah sosial.
14. Peningkatan Koordinasi masalah kesejahteraan social
15. Peningkatan koordinasi masalah kepemudaan dan lembaga kepemudaan

2.4 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi program prioritas Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini mempunyai beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- b. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- c. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- d. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
- e. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- c. Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset SKPD

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penatausahaan Keuangan.
- b. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD.

5. Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan.

Program ini mempunyai kegiatan,:

- a. Kebijakan di Bidang Pendidikan

6. Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial

Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.
- b. Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS
- c. Kebijakan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
- d. Kegiatan Rapat Kerja Daerah Tim Pembina UKS Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- e. Kebijakan Penanganan Bencana dan Pasca Bencana.
- f. Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial.
- g. Kebijakan Penanganan Masalah Sosial

7. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama.

Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi Pelayanan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji di Padang.
- b. Biaya Operasional Masjid Raya Sumatera Barat.

8. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama

Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penilaian Didikan Subuh Berprestasi Provinsi Sumatera Barat.
- b. Kegiatan Pencerahan Agama dan Silaturahmi Bulan Ramadhan.
- c. Kegiatan Wirid / Ceramah Agama Mingguan PNS di Lingkungan Kantor Gubernur.
- d. Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam di Lingkungan Kantor Gubernur.
- e. Kegiatan Pelatihan Qori/Qoriah, Musafir/Mufasirah, Hafiz/Hafizah Sumatera Barat.
- f. Kegiatan Pengiriman Kafilah Sumatera Barat dalam Rangka STQ Nasional.
- g. Musabaqah Qiraatil khutub tingkat nasional
- h. Pengembangan Tilawatil Quran se Sumatera Barat.

9. Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan.

Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Barang/Uang Pengurus Rumah Ibadah dan Organisasi Keagamaan se Sumbar.
- b. Kegiatan Koordinasi Bidang Keagamaan di Sumatera Barat.
- c. Kegiatan Pelatihan Guru-guru TPQ/MDT se Sumbar.
- d. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pondok Al-Qur'an se Sumatera Barat.
- e. Kegiatan Pelatihan Imam Masjid se Sumatera Barat

10. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Rapat Koordinasi Kepemudaan di Sumatera Barat.
- b. Kegiatan Rapat Koordinasi Lembaga/Organisasi Kepemudaan di Sumatera Barat

2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penyusunan IKU berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 16 Desember 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Disamping itu, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IK/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah diharuskan menyajikan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada LAKIP.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja secara baik dan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur.

Merujuk pada Peraturan diatas maka Indikator Kinerja Utama Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN
Terwujudnya peningkatan layanan bidang sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan	Penduduk yang mendaftar dan mendapatkan porsi berangkat haji.	$\frac{\sum \text{Porsi keberangkatan haji Sumbar Tahun ke N}}{\sum \text{Penduduk yang mendaftar haji belum berangkat tahun ke N}} \times 100\%$
Terwujudnya peningkatan pema-haman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Persentase peningkatan zakat yang dikelola Badan Amil Zakat 	$\frac{\sum \text{Peningkatan Pengumpulan Zakat yang dikelola Tahun ke N}}{\sum \text{Target X Jumlah Pengumpulan Zakat Tahun ke N-1}} \times 100\%$
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase peningkatan penyaluran zakat dari Badan Amil Zakat 	$\frac{\sum \text{Peningkatan Penyaluran Zakat Tahun N}}{\sum \text{Target X Jumlah Penyaluran Zakat Tahun N-1}} \times 100\%$
	<ul style="list-style-type: none"> Peringkat kafilah Sumatera Barat pada MTQN Tingkat Nasional 	$\frac{\text{Peringkat Kafilah Sumatera Barat pada MTQN Tk Nasional Tahun N}}{\text{Target Peringkat Kafilah Sumbar Pada MTQN Tahun ke N}}$
Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi SDM dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Terbentuknya Tim Pembina dan Sekretariat TP UKS/M <ol style="list-style-type: none"> Kab/Kota Kecamatan 	$\frac{\sum \text{Tim pembina UKS Kab/Kota dan Kecamatan yang terbentuk}}{\sum \text{Target Tim Pembina UKS yang telah terbentuk}} \times 100\%$
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Guru TPQ/MDT yang dilatih 	$\frac{\text{Jumlah Guru TPQ/MDT yang dilatih Tahun ke N}}{\text{Target Guru yang dilatih Tahun ke N}}$
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pengurus Rumah Ibadah yang dilatih 	$\frac{\text{Jumlah Pengurus Rumah Ibadah yang dilatih Tahun ke N}}{\text{Target Pengurus yang dilatih Tahun ke N}}$
Terwujudnya koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan.	Persentase hasil rumusan rapat koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{target rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$

2.6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja. Pada Tahun Anggaran 2018, Rencana Kinerja Tahunan Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah seperti tabel berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018
Biro Bina Mental dan Kesra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Terwujudnya peningkatan pelayanan pada penyelenggaraan peribadatan agama	1. Persentase Penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan haji.	6
2.	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	1. Persentase Peningkatan Zakat yang dikelola Badan Amil Zakat (Baznas).	5
		2. Persentase peningkatan penyaluran zakat dari Badan Amil Zakat (Baznas)	5
3.	Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi SDM dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan	1. Jumlah Lembaga Didikan subuh yang diberikan penghargaan	6
		2. Persentase Terbentuknya Tim Pembina dan Sekretariat TP UKS/M	65
		a. Kab/ Kota	50
		b. Kecamatan	95
		2. Jumlah Guru TPQ/MDT yang dilatih	270
		3. Jumlah pengurus rumah ibadah yang dilatih	90
		4. Jumlah Guru Pondok AlQuran yang dilatih	120
4.	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan daerah.	1. Jumlah ninik mamak penghulu, bundo kanduang yang ditingkatkan pengetahuannya	100%
5.	Terwujudnya koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan.	1. Persentase hasil rumusan rapat koordinasi yang ditindaklanjuti	100%

6	Meningkatnya pengelolaan organisasi yang baik	1. Nilai Evaluasi akuntabilitas kinerja	B
		2. Persentase capaian realisasi keuangan, pengelolaan program/kegiatan sesuai anggaran kas	95%

2.7 Penetapan Kinerja Tahun 2018

Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ditetapkan dengan mengacu pada sasaran strategis RPJMD yaitu meningkatnya kompetensi aparatur daerah. Sebagai implementasi pencapaian sasaran tersebut, Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya kompetensi aparatur sesuai kompetensi jabatan yang dimiliki, meningkatnya disiplin, etos kerja dan motivasi aparatur, terpenuhinya hak dan kewajiban aparatur sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk mencapai sasaran strategis instansi menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini diukur dengan beberapa indikator kegiatan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Sasaran strategis Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. Penetapan Kinerja Biro Bina Mental

dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya peningkatan pelayanan pada penyelenggaraan peribadatan agama	Persentase Penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan haji.	6	
2	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	1. Persentase Peningkatan Zakat yang dikelola Badan Amil Zakat (Baznas).	5	
		2. Peringkat Kafilah Sumatera Barat dalam MTQ Nasional	7	
		3. Persentase peningkatan penyaluran zakat dari Badan Amil Zakat (Baznas)	5	
3.	Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi SDM dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan	1. Jumlah Lembaga Didikan Subuh Yang diberikan penghargaan	5	
		2. Persentase Terbentuknya Tim Pembina dan Sekretariat TP UKS/M	a. Kab/ Kota	60
			b. Kecamatan	40
		3. Jumlah Guru TPQ/MDT yang dilatih	90	
		4. Jumlah pengurus rumah ibadah yang di latih	174	
5. Jumlah Guru Pondok Alquran yang dilatih	90			
4.	Terwujudnya koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan.	Persentase hasil rumusan rapat koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	
5.	Terwujudnya peningkatan pengelolaan organisasi yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B	

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp. 15.701.255.153,-	APBD
2.	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama	Rp. 5.204.051.575,-	APBD
3.	Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	Rp. 1.129.191.792,-	APBD
4.	Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	Rp. 1.380.823.870,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 23.415.322.390,-	

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Bab ini secara umum menjelaskan tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja, pencapaian indikatornya dilaksanakan oleh Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan membahas Akuntabilitas Keuangan.

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran hasil atau tingkat keberhasilan individu secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Dalam membangun kinerja disebutkan bahwa kinerja mencakup tiga komponen penting yaitu hasil kerja, proses kerja dan satuan waktu kerja. Hasil kerja merupakan perbandingan antara target normative organisasi dengan realisasi yang dicapai. Sedangkan proses kerja berkaitan dengan serangkaian aktivitas dalam organisasi. Satuan waktu kerja berkaitan dengan kapan dilakukan pengukuran kinerja.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode evaluasi kinerja dan metode perbandingan capaian sasaran.

Metode evaluasi kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir PK dan RKT, perbandingan dilakukan dengan melihat perbandingan antara rencana dan realisasi untuk masing - masing indikator kinerja kegiatan. Metode ini terutama akan bermanfaat untuk melakukan evaluasi internal atas kelemahan- kelemahan dan kendala- kendala yang terjadi dalam organisasi dalam pelaksanaan kegiatannya.

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi (performance result) yang dicapai organisasi, selanjutnya akan dilihat performance gap yang ada serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa yang akan datang.

Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak- pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Adapun elemen pada suatu pengukuran kinerja antara lain :

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi.
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi.
4. Evaluasi kinerja.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Penetapan kinerja Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah provinsi Sumatera Barat disusun dan berdasar dari 6 sasaran yang telah ditetapkan, sasaran tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan pada penyelenggaraan peribadatan agama .
2. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat.
3. Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi sumber daya manusia dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan.
4. Terwujudnya koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan
5. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan daerah
6. Meningkatnya pengelolaan organisasi yang baik.

Dari 6 sasaran yang telah ditetapkan sebagai kinerja pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka disusunlah indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja instansi. Indikator-indikator kinerja yang telah disusun menjadi target kinerja telah dirinci dan disesuaikan dengan Tupoksi Biro Bina Mental dan Kesra.

Target yang telah disusun tadi akan dicapai dan ditunjang melalui pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2018 yang terdapat pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Hasil pengukuran pencapaian kinerja tahun 2018 sesuai dengan sasaran Strategis Biro Bina Mental dan Kesra dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Terwujudnya peningkatan pelayanan pada penyelenggaraan peribadatan agama	Persentase Penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan haji.	6%	6,8%	113%	
2	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	1. Persentase Peningkatan Zakat yang dikelola Badan Amil Zakat (Baznas).	5%	1008%	2010.6%	
		2. Peringkat Kafilah Sumatera Barat dalam MTQ Nasional	7	14	-200%	
		3. Persentase peningkatan penyaluran zakat dari Badan Amil Zakat (Baznas)	5	-79.61%	159.2%	
3.	Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi SDM dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan	1. Jumlah Lembaga Didikan Subuh Yang diberikan penghargaan	5	5	100%	
		2. Persentase Terbentuknya Tim Pembina dan Sekretariat TP UKS/M	a. Kab/ Kota	60	94.73%	158%
			b. Kecamatan	40	70.39%	176%
		3. Jumlah Guru TPQ/MDT yang dilatih	90	90	100%	
		4. Jumlah pengurus rumah ibadah yang di latih	174	174	100%	
5. Jumlah Guru Pondok Alquran yang dilatih	90	90	100%			
4.	Terwujudnya koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan.	Persentase hasil rumusan rapat koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
5.	Terwujudnya peningkatan pengelolaan organisasi yang baik	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B	B	100%	

3.2 Capaian Kinerja Biro Bina Mental dan Kesra

Pembahasan Pencapaian Kinerja Per Sasaran

✚ **Sasaran 1** : Terwujudnya peningkatan layanan bidang sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan

Indikator 1 : Persentase Penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan haji.

Persentase Penduduk yang Mendaftar dan Mendapat Porsi Keberangkatan Ibadah Haji ditargetkan sebesar 6 % diukur berdasarkan besaran jumlah calon Jemaah

Haji yang telah mendapat porsi keberangkatan pada tahun ke n (2018) adalah sebesar 4704 orang dibagi jumlah penduduk yang terdaftar tapi belum diberangkatkan sampai tahun ke n-1 (2017) adalah sebesar 69.021 orang dengan atau besaran realisasi adalah sebesar 6,8%.

$$\text{Formula} = \frac{\text{Jumlah Porsi keberangkatan Haji Tahun n}}{\text{Jumlah Penduduk mendaftar Haji belum berangkat Tahun n-1}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2017 persentase capaian terhadap indikator ini adalah sebesar 6,26% dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan 4689 calon jemaah haji yang berarti mengalami peningkatan jumlah jemaah haji yang diberangkatkan sebanyak 115 orang jemaah pada tahun 2018.

Target yang ditetapkan sebesar 6 % tersebut sesuai dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan Biro Bina Mental dan Kesra dalam dokumen RENSTRA Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Program dan Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada sasaran 1 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat adalah program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, yang kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Pelayanan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji di Padang, yang dapat digambarkan pelaksanaannya sebagaimana dibawah ini

Pelayanan kepada calon Jemaah Haji baik itu pada pemberangkatan maupun pemulangan Jemaah Haji merupakan suatu hal yang mutlak dan penting. Kepuasan terhadap suatu pelayanan merupakan hal yang didambakan oleh penerima layanan, apalagi memberikan layanan kepada masyarakat dalam hal ini kepada calon Jemaah Haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Makah baik mulai dari sebelum keberangkatan, selama pelaksanaan ibadah haji sampai dengan pemulangan. Kepuasan tersebut sangat berhubungan dengan kualitas pelayanan yang diberikan, semakin tinggi pelayanan yang diberikan tentunya semakin tinggi tingkat kepuasan dari pemakai layanan.

Bentuk-bentuk layanan yang diberikan dari mulai keberangkatan, selama pelaksanaan ibadah sampai dengan pemulangan antara lainnya seperti pelayanan kesehatan, konsumsi selama masa calon jemaah di inapkan sebelum keberangkatan, perlengkapan ibadah haji, pengecekan paspor keberangkatan, akomodasi selama pelaksanaan haji, bimbingan selama ibadah haji dan lainnya sampai dengan pemulangan, merupakan layanan yang berhak didapatkan oleh jemaah haji. Hal-hal tersebut setiap tahunnya di usahakan ada peningkatan

kualitas terhadap pelayanannya. Sehingga perlu dilakukan pengukuran kepuasan terhadap layanan yang diberikan, tingkat kepuasan terhadap layanan ini dapat dilihat dari jumlah keluhan yang tertangani maupun jumlah keluhan yang belum tertangani.

Dan kegiatan yang mendukung untuk tercapainya kinerja ini adalah kegiatan Koordinasi Pelayanan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji di Padang, dengan rincian pelaksanaan kegiatan dapat digambarkan dibawah ini.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berperan sebagai koordinator pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Embarkasi dan Debarkasi Bandar Internasional Minangkabau Sumatera Barat.

Jumlah jamaah haji yang dilayani melalui Embarkasi dan Debarkasi Bandar Internasional Minangkabau Sumatera Barat Tahun 2016 total sebanyak 4929 orang calon jamaah haji yang terdiri dari 3631 Orang dari Sumatera Barat dan 1298 orang calon jamaah dari Bengkulu. Jamaah haji yang dilayani melalui Embarkasi dan Debarkasi Bandara Internasional Minangkabau Sumatera Barat.

Embarkasi Padang ditetapkan oleh Menteri Agama RI dengan SK Nomor 20 tahun 2006 tanggal 3 Agustus 2006 dan diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Desember 2006. Embarkasi Padang dalam melaksanakan penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan jamaah calon haji dari Tanah Air ke Tanah Suci telah memasuki tahun ke sembilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Embarkasi Padang sudah 10 (sepuluh) kali melaksanakan penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 142 Tahun 2013 tentang Penetapan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya dan Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu sebagai Bandara Embarkasi Haji Antara, maka jamaah haji Provinsi Bengkulu tidak lagi menginap di Asrama Haji Embarkasi Padang. Jamaah haji Provinsi Bengkulu hanya transit di Bandara Embarkasi Padang kemudian melanjutkan penerbangan ke Madinah.

Embarkasi Padang dalam memberangkatkan jamaah haji bertekad untuk memberikan pelayanan prima dan terbaik bagi kepuasan jamaah haji serta menerima masukan yang berguna bagi peningkatan kualitas Embarkasi Padang baik dari jamaah, petugas dan elemen masyarakat lainnya. Berkat kerjasama yang baik dengan semua pihak, alhamdulillah pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Padang telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Usaha dan kerjasama yang dilakukan oleh

segenap stake holder pada tahun ke sepuluh pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, dimana pada tahun ini Embarkasi Padang telah sukses melaksanakan penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji dengan baik dan mendapat apresiasi yang positif dari berbagai pihak.

❖ **Pemberangkatan**

Embarkasi Padang pada tahun ini memberangkatkan jamaah calon haji dan petugas kloter terdiri dari 17 kloter dengan jumlah 6.347 orang terdiri dari Provinsi Sumatera Barat 4.704 orang dan Provinsi Bengkulu 1.643 orang dan petugas kloter sebanyak 80 orang (TPHI 16 orang, TPIHI 16 orang dan TKHI 48 orang), seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 1
Data Pemberangkatan Calon Jamaah Haji Embarkasi Padang
Tahun 1439 H/2018 M

No.	Provinsi	Jumlah Kloter	Jamaah Haji	Petugas Kloter			Jumlah
				TPHI	TPIHI	TKHI	
1.	Sumatera Barat	13	4.644	12	12	36	4.704
2.	Bengkulu	4	1.623	4	4	12	1.643
Jumlah		17	6.267	16	16	48	6.347

Sumber : Bagian Bintal Biro Bina Mental dan Kesra

Tabel. 2
Jumlah Calon Jamaah Haji Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan, Bank, Pengalaman Haji dan Umur Pada Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji di Embarkasi Tahun 1439 H/2018 M

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentasi (%)
1.	Pria	2.581	41,20
2.	Wanita	3.686	58,80
Jumlah		6.267	100,00

Sumber : Bagian Bintal Biro Bina Mental dan Kesra

b. Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentasi (%)
1.	SD	1.450	23,10
2.	SLTP	623	9,90

3.	SLTA	1.720	27,40
4.	D1/D2/D3/SM	554	8,80
5.	S1	1.589	25,40
6.	S2	295	4,70
7.	S3	32	0,50
8.	Lain-lain	4	0,10
Jumlah		6.267	100,00

Sumber : Bagian Bintal Biro Bina Mental dan Kesra

c. Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentasi (%)
1.	Pegawai Negeri Sipil	2.101	33,50
2.	TNI/POLRI	46	0,70
3.	Dagang	532	8,50
4.	Tani/Nelayan	647	10,30
5.	Swasta	849	13,50
6.	Ibu Rumah Tangga	1.566	25,00
7.	Pelajar/Mahasiswa	64	1,00
8.	BUMN/BUMD	145	2,30
9.	Pensiunan	317	5,10
Jumlah		6.267	100,00

Sumber : Bagian Bintal Biro Bina Mental dan Kesra

d. Berdasarkan Bank

No.	Bank	Jumlah	Persentasi (%)
1.	Bank Nagari	1.346	21,50
2.	BMI	458	7,30
3.	BTN	88	1,40
4.	BRIS	2.005	32,00
5.	BNIS	658	10,50
6.	BSM	1.687	26,90
7.	Mega Syariah	25	0,40
Jumlah		6.267	100,00

Sumber : Bagian Bintal Biro Bina Mental dan Kesra

e. Berdasarkan Pengalaman Haji

No.	Pengalaman Haji	Jumlah	Persentasi (%)
1.	Pernah Haji	230	3,70
2.	Belum Pernah Haji	6.037	96,30
Jumlah		6.267	100,00

Sumber : Bagian Bintal Biro Bina Mental dan Kesra

f. Berdasarkan Umur

No.	Kelompok Umur	Jumlah	Persentasi (%)
1.	00 s.d 10 tahun	0	0,0
2.	11 s.d 20 tahun	12	0,0

3.	21 s.d 30 tahun	61	1,0
4.	31 s.d 40 tahun	296	5,0
5.	41 s.d 50 tahun	1.320	21,0
6.	51 s.d 60 tahun	2.610	42,0
7.	61 s.d 70 tahun	1.601	26,0
8.	71 s.d 80 tahun	322	5,0
9.	81 s.d 90 tahun	44	1,0
10.	91 tahun lebih	1	0,0
Jumlah		6.267	100,00

Pemberangkatan calon jemaah haji Embarkasi Padang ke Tanah Suci menggunakan pesawat Garuda Indonesia Boeing 777 Seri 300 ER dengan kapasitas 393 seat dimulai tanggal 16 Juli s.d 15 Agustus 2018, yang terbangi dalam 2 gelombang pemberangkatan sebagai berikut :

1. Gelombang I :
 Kloter 1 – 12
 Pemberangkatan : 16 Juli s.d 29 Juli 2018
 Rute : Padang-Madinah-Makkah-Jeddah-Padang
2. Gelombang II :
 Kloter 13 – 17
 Pemberangkatan : 29 Juli s.d 15 Agustus 2018
 Rute : Padang-Jeddah-Makkah-Madinah-Padang

Setiap jemaah calon haji yang akan berangkat diinapkan terlebih dahulu satu malam di Asrama Haji Embarkasi Padang dan mendapat konsumsi 3 kali makan dan 2 kali snack kecuali jemaah haji asal Provinsi Bengkulu karena jemaah haji Provinsi Bengkulu hanya transit di Bandara Embarkasi Padang.

Jemaah calon haji Embarkasi Padang pada setiap kloter dilepas secara resmi oleh pejabat pemerintah daerah dan PPIH Embarkasi Padang yang dipusatkan di Aula Utama Asrama Haji Embarkasi Padang dan di Bandara Internasional Minangkabau.. Realisasi penerbangan pemberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Padang sebanyak 17 kloter semuanya Alhamdulillah dapat berjalan lancar sesuai rencana dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel. 3
Realisasi Pemberangkatan Calon Jemaah Haji Embarkasi Padang
Tahun 1439 H/2018 M

Kloter	Perkiraan (WIB)	Realisasi (WIB)	Cepat (menit)	Tepat (menit)	Lambat (menit)
1	07.20	07.20	-	T	-

2	07.15	07.32	10	-	-
3	12.05	12.05	-	T	-
4	16.05	16.27	-	-	22
5	22.05	21.55	10	-	-
6	04.05	03.48	17	-	-
7	06.55	06.55	-	T	-
8	06.05	05.33	32	T	-
9	06.05	06.05	-	T	-
10	06.05	06.05	-	T	-
11	17.35	17.35	-	T	-
12	17.15	17.15	-	T	-
13	20.25	20.20	5	-	-
14	22.05	22.05	-	T	-
15	22.05	22.05	-	T	-
16	00.45	00.37	8	-	-
17	23.25	00.05	-	-	40

Keterangan :

1. Cepat : 6 kali
2. Tepat waktu : 9 kali
- Lambat : 2 kali

❖ **Pemulangan**

Pemulangan jemaah haji Embarkasi Padang dari Tanah Suci ke Tanah Air menggunakan pesawat Garuda Indonesia Boing 777 Seri 300 ER dengan kapasitas 393 seat dimulai tanggal 27 Agustus s.d 25 September 2018 yang terbagi dalam 2 gelombang pemulangan sebagai berikut :

1. Gelombang I :
 - Kloter 1 – 12
 - Pemulangan : 27 Agustus s.d 09 September 2018
 - Rute : Padang-Madinah-Makkah-Jeddah-Padang
2. Gelombang II :
 - Kloter 13 – 17
 - Pemberangkatan : 10 September s.d 25 September 2018
 - Rute : Padang-Jeddah-Makkah-Madinah-Padang

Jemaah haji Embarkasi Padang yang wafat selama di Tanah Suci berjumlah 10 orang dengan perincian jemaah haji Provinsi Sumatera Barat 3 orang dan jemaah haji Provinsi Bengkulu 7 orang.

Pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 1439 H/2018 M dari Tanah Suci dimulai tanggal 27 Agustus s.d 25 September 2018, dengan realisasi jadwal pemulangan jemaah haji sebagai berikut :

Tabel. 6
Realisasi Data Pemulangan Jemaah Haji Debarkasi Padang
Tahun 1439 H /2018 M

Kloter	Perkiraan (WIB)	Realisasi (WIB)	Cepat (Menit)	Tepat (Menit)	Lambat (Menit)
1	00.05	01.50	-	-	105
2	01.15	01.40	-	-	25
3	07.30	07.45	-	-	15
4	11.15	12.08	-	-	53
5	17.15	18.08	-	-	53
6	23.15	23.55	-	-	40
7	01.05	01.17	-	-	12
8	01.05	01.28	-	-	23
9	01.05	02.43	-	-	98
10	01.05	01.25	-	-	20
11	10.15	10.48	-	-	33
12	11.33	11.45	-	-	12
13	14.40	15.02	-	-	22
14	17.10	17.10	-	T	-
15	17.10	17.10	-	T	-
16	20.20	20.40	-	-	20
17	00.05	00.13	-	-	8

Keterangan :

1. Cepat : - Kali
2. Tepat waktu : 2 Kali
3. Lambat : 15 Kali

Pada fase pemulangan ini keterlambatan berkisar antara 8 menit sampai dengan 105 menit yang disebabkan alasan teknis dan operasional di Bandara King Abdul Azis Jeddah dan Bandara AMMA Madinah.

A. Permasalahan

Dalam operasional penyelenggaraan haji di Embarkasi Padang tahun 1439 H/2018 M, kami menyadari masih terdapat permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya. Walaupun secara prinsip masalah tersebut tidaklah menjadi halangan dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji dan mensukseskan penyelenggaraan operasional haji di Embarkasi Padang tahun 1439 H/2018 M.

1. Kondisi di Asrama Haji

Secara umum kondisi asrama haji Embarkasi Padang secara umum cukup representative dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Tetapi masih terdapat permasalahan yang ditemui dilapangan diantaranya selasar

yang menghubungkan antar gedung belum cukup memadai, karena sewaktu hari hujan jemaah haji agak kesulitan melakukan aktivitas baik menuju Masjid, ruang makan dll. Disamping itu kondisi Masjid Asrama Hai yang belum selesai 100 %. Tetapi secara prinsip hal ini tidak terlalu mengganggu pelayanan kepada jemaah haji dalam melaksanakan ibadah di Masjid Asrama Haji.

2. SDM (Sumber Daya Manusia)

Sumber daya manusia (SDM) pada operasional penyelenggaraan haji tahun 1439 H/2018 M secara umum sudah cukup dan sangat memadai.

3. Permasalahan Terkait Dengan Jemaah Haji

Permasalahan yang terkait dengan jemaah haji pada operasional penyelenggaraan haji tahun 1439 H/2018 M yang cukup menonjol adalah ketika hujan, jemaah haji sangat kesulitan untuk melakukan aktivitas. Hal ini disebabkan kurang memadainya selasar penghubung antar gedung. Sehingga jemaah haji terkena langsung air hujan ketika melakukan aktivitas, hal ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap kesehatan jemaah haji. Disamping itu masih terlihat jemaah haji yang keluar pagar asrama dengan berbagai alasan meskipun sudah dilarang oleh petugas.

4. Permasalahan Lainnya Yang Mungkin Muncul

Permasalahan yang timbul terkait dari sebab-sebab lainnya pada operasional penyelenggaraan haji di Embarkasi Padang tahun 1439 H/2018 M diantaranya adanya pengunjung yang tidak memakai tanda pengenalan yang masuk ke areal asrama haji. Hal ini jika dibiarkan bisa berdampak kepada keamanan barang bawaan jemaah haji dan juga hal ini akan memancing pengunjung lainnya untuk masuk ke dalam areal asrama haji.

B. Pemecahan Masalah/Solusi

Adapun alternative pemecahan permasalahan yang sudah dilakukan sehubungan dengan kendala yang ada pada operasional penyelenggaraan haji di Embarkasi Padang tahun 1439 H/2018 M adalah sebagai berikut :

1. Kondisi di Asrama Haji

Terkait selasar yang menghubungkan antar gedung belum cukup memadai, PPIH menyarankan kepada pihak UPT Asrama Haji untuk menyediakan fasilitas selasar penghubung yang lebih representative. Kemudian jika terjadi hujan lebat, PPIH menyarankan jemaah untuk memakai payung, tidak

memaksakan diri menempuh hujan dan bahkan PPIH menyediakan bus yang bisa memfasilitasi jemaah.

2. SDM (Sumber Daya Manusia)


Untuk meningkatkan pemahaman panitia terhadap tugas pokok dan fungsinya, perlu kiranya dilakukan sosialisasi terkait tugas dan fungsi panitia.

3. Permasalahan Terkait Dengan Jemaah Haji

Terkait dengan kurang memadainya selasar penghubung antar gedung, jika turun hujan PPIH menyarankan jemaah untuk memakai payung, tidak memaksakan diri menempuh hujan dan bahkan PPIH menyediakan bus yang bisa memfasilitasi jemaah. Adapun terkait masih ada jemaah haji yang keluar pagar asrama dengan berbagai alasan, PPIH menghimbau kepada jemaah haji tidak lagi keluar asrama haji karena hal tersebut cukup beresiko bagi jemaah haji. Disamping panitia juga memperketat penjagaan dipintu gerbang asrama haji.

4. Permasalahan Lainnya Yang Mungkin Muncul

Pengunjung yang tidak memakai tanda pengenal akan dipanggil oleh pihak keamanan dan diintegrasikan. Bagi pengunjung yang ada kepentingan ingin masuk ke dalam areal asrama haji, bisa mengajukan permohonan kepada panitia dan setelah disetujui maka akan diberikan izin masuk atau tanda pengenal masuk ke asrama haji, dengan catatan tanda pengenal tersebut diberi foto dan nama serta tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain.

 **Sasaran 2** : Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat

Indikator 1 : Persentase Peningkatan Zakat yang dikelola Badan Amil Zakat (Baznas).

Zakat/wakaf/sedekah merupakan salah satu bentuk nyata pengamalan ajaran agama, khusus Islam. Meningkatnya jumlah umat Islam yang membayar Zakat/wakaf/sedekah merupakan indikator kinerja yang relevan untuk mengukur keberhasilan sasaran meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan wajib dilaksanakan sedangkan wakaf/infak/sedekah merupakan amalan sunat, namun tidak kalah

pentingnya dalam rangka peningkatan iman dan taqwa Umat Islam yang merupakan mayoritas masyarakat Sumatera Barat.

Target Kinerja yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Persentase peningkatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Lainnya untuk dapat dicapai dengan peningkatan capaian sebesar 5% pada tahun 2018.

Indikator Kinerja Persentase peningkatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Lainnya diukur dari persentase kenaikan zakat, infak, sedekah yang diterima Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2017 dibandingkan dengan Tahun 2016.

Tabel 3.6
Perbandingan Penerimaan Zakat
Baznas Provinsi Sumatera Barat

TAHUN				
2014	2015	2016	2017	2018
6.826.525.113,-	7.463.013.735,-	11.149.385.130,-	8.519.615.809,-	12.815.438.981,-

Dari tabel di atas terlihat saldo akhir penerimaan zakat tahun 2018 sebesar Rp. 12.815.438.981,- dibandingkan dengan penerimaan zakat tahun 2017 Rp. 8.519.615.809,- dengan selisih lebih sebesar Rp. 4.295.823.172,-. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pengumpulan zakat, infak, sedekah melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat melampaui target, dengan capaian lebih dari 5% , yaitu meningkat dengan capaian sebesar 1008% atau 20106% melampaui target.

$$\text{Formula} = \frac{\text{Jumlah peningkatan pengumpulan zakat Tahun } n}{\text{Target} \times \text{Jumlah pengumpulan zakat Tahun } n-1} \times 100\%$$

Faktor yang mengakibatkan peningkatan pengumpulan zakat ini salah satunya adalah sosialisasi baik pada instansi maupun masyarakat sehingga tercipta pemahaman untuk membayar Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional. Dan juga peningkatan ini diakibatkan oleh kesadaran PNS dalam membayar zakat melalui BAZNAS.

Perpindahan wewenang urusan pendidikan menengah ke Provinsi juga memberikan efek yang besar karena seluruh SMA/SMK se Sumatera Barat pemabayaran Zakat profesi para guru SMA/SMK se Sumatera Barat.

Peningkatan dan penurunan penerimaan zakat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat disingkat sebagai berikut :

1. Faktor Religiusitas berpengaruh terhadap motivasi masyarakat dalam membayar Zakat Infak Sedeqah pada lembaga amil zakat.
2. Faktor Psikologis berpengaruh terhadap motivasi masyarakat dalam membayar Zakat Infak Sedeqah pada lembaga amil zakat.
3. Faktor Sosial berpengaruh terhadap motivasi masyarakat dalam membayar Zakat Infak Sedeqah pada lembaga amil zakat.
4. Regulasi pemerintah berpengaruh terhadap motivasi masyarakat dalam membayar Zakat Infak Sedeqah pada lembaga amil zakat.
5. Atribut lembaga amil zakat berpengaruh terhadap motivasi masyarakat dalam membayar Zakat Infak Sedeqah pada lembaga zakat

✚ **Sasaran 2** : Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat

✚ **Indikator 2** : Peringkat Kafilah Sumatera Barat dalam MTQ Nasional

Sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 dan dalam rangka pengimplementasikan Visi, Misi Gubernur Sumatera Barat dalam menentukan arah dan kebijakan program pembangunan daerah, di mana sesuai dengan Misi 1, yaitu meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradab dan berbudaya berdasarkan falsafah “ Adat basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah “.

Salah satu perwujudannya dilaksanakan oleh Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 dengan cara mengikuti kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an Nasional XXVII yang dilaksanakan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk pelaksanaan Tahun 2018.

Adapun kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an Nasional XVII ini diawali dengan kegiatan Training Center I, Training Center II, Training Center III dan Training Center Pemantapan. Yang mana semua kegiatan Training ini mendatangkan pelatih pelatih sesuai dengan bidang keahlian masing masing, baik pelatih/narasumber dari Pusat maupun daerah.

Musabaqah Tilawatil Qur’an Nasional XXVII, Provinsi Sumatera Barat mengirimkan peserta kafilah sebanyak 81 orang yang terdiri dari peserta, pelatih daerah, Official dan wartawan.

Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan Pengiriman Kafilah Sumatera Barat, hal ini tentu akan dapat menjadikan sebagai perekat sosial, menjadikan media silaturahmi untuk merajut Persatuan, Persahabatan, Persaudaraan serta dapat membangun kerukunan umat yang melahirkan rasa ketakwaan kebersamaan dan peningkatan kapasitas spiritual dalam pemahaman Al-Qur'an serta membumikan wahyu Allah sebagai petunjuk manusia dimuka bumi.

Sesuai hasil penilaian dewan juri pada peserta MTQ Nasional XXVII dari seluruh cabang perlombaan yang diikuti oleh seluruh Provinsi se Indonesia (34 Provinsi), untuk Sumatera Barat ditetapkan sebagai urutan XIV dengan perolehan Mendali; 1 emas, 1 perak dan 0 perunggu dan para juara harapan 1, 2 dan 3 pada cabang perlombaan MTQ.

Hal ini jauh dari target yang direncanakan, peringkat yang diharapkan adalah ranking 7 (tujuh) Nasional namun pencapaian adalah ranking 14. Penurunan peringkat ini diakibatkan oleh lebih tingginya pencapaian nilai peserta provinsi lain yang melampaui nilai peserta Sumbar, yang diakibatkan tingkat standar peserta yang dikirim belum maksimal karena pelatihan yang diberikan kepada calon peserta MTQ dari Sumbar tidak kontinu dilaksanakan diakibatkan kekurangan anggaran. Peserta dari Sumbar merupakan Juara MTQN Tingkat Provinsi Tahun 2017, yang seharusnya mendapatkan pelatihan yang kontinu agar selalu dapat meningkatkan prestasinya.

Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016, kafilah Provinsi Sumatera Barat menduduki peringkat 7 Nasional, berarti mengalami penurunan prestasi sebanyak 100%.

✚ **Sasaran 2** : Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat

Indikator 3 : Persentase Peningkatan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah

Peran zakat sebagai sektor sosial ekonomi Islam penting diartikulasikan sebagai solusi untuk mewujudkan keamanan hidup perorangan dan tercapainya kenyamanan sosial dalam batas yang wajar. Dalam Islam, setiap orang harus dapat menikmati hidup secara layak sebagai manusia. Dalam standar minimal, setiap orang harus terpenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan memperoleh pekerjaan. Siapapun tidak boleh dibiarkan, walau pun non-muslim, hidup menggelandang tanpa tempat tinggal, atau kehilangan kesempatan untuk membina keluarga.

Peruntukan zakat berdasarkan petunjuk Al Quran dan Sunnah Nabi, secara eksplisit mengarah pada perlindungan keamanan individu dan masyarakat sesuai *maqasyid syariah*. Masyarakat secara keseluruhan akan memperoleh rasa aman dan makmur sebagai dampak positif redistribusi kekayaan secara adil melalui zakat, infak dan sedekah. Hadis yang sering dikutip oleh para juru dakwah ketika menguraikan komitmen Islam pada keadilan sosial ialah, *“Sesungguhnya Allah mewajibkan atas orang-orang kaya muslim mengeluarkan hartanya seukuran yang dapat memberikan keluasaan hidup bagi orang miskin. Dan kesengsaraan orang miskin adalah akibat perilaku orang kaya. Ketahuilah, sungguh Allah akan meminta pertanggung-jawaban orang-orang kaya macam itu dengan pengadilan yang berat dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.”* (HR Thabrani)

zakat dapat diartikan sebagai suatu bentuk subsidi dari masyarakat mampu kepada yang tidak mampu. Jika dapat dilakukan secara berkesinambungan dan dikelola dengan baik, ia meyakini zakat dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan.

Tingkat capaian yang ditargetkan untuk indikator persentase Peningkatan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah sebesar 5% dibandingkan tahun lalu (2017). Jumlah Zakat, sedekah dan infaq yang disalurkan untuk tahun 2017 adalah sebesar 8.838.308.200,- dan penyaluran tahun 2018 sebesar 8.134.607.000,- jadi persentase jumlah penyaluran zakat, infak dan sedekah mengalami penurunan sebesar Rp 703.701.200,- atau sebesar -79,61% dari target yang direncanakan

$$\text{Formula} = \frac{\text{Jumlah peningkatan penyaluran zakat Tahun } n}{\text{Target} \times \text{Jumlah penyaluran zakat Tahun } n-1} \times 100\%$$

Penyaluran zakat mengalami penurunan sebanyak . Karena sesuai dengan ketentuannya bahwa zakat yang dapat disalurkan kembali adalah sebanyak 87,5% dari total pengumpulan, karena 12,5% merupakan hak amil zakat.

- ✚ **Sasaran 3** : Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi SDM dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan

Indikator : Jumlah Lembaga Didikan Subuh Yang diberikan penghargaan

Didikan Subuh merupakan Program Pendidikan Islam yang lahir dan berkembang di Minangkabau, Didikan Subuh adalah Suatu konsepsi Pendidikan Islam yang fungsional dan praktis di waktu subuh dengan pusat kegiatan di Masjid dan Mushalla.

Didikan Subuh disebut sebagai suatu kosepsi Pendidikan Islam, maksudnya adalah bahwa Didikan subuh itu adalah suatu pendapat, rancangan, konsep sebuah cita-cita tentang pembentukan kepribadian muslim , dalam sistem kependidikan yang berdasarkan Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Didikan Subuh bersifat fungsional dan praktis, maksudnya adalah materi pelajaran Didikan Subuh itu merupakan ibadah dan muamalah yang dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana dan mudah dipahami.

Program Didikan Subuh di gelar setiap subuh hari Ahad. Namun ada juga dilaksanakan pada subuh hari-hari yang lain bila liburan sekolah. Mengapa dilaksanakan pada subuh hari? Karena Program Didikan Subuh itu dikembangkan dari pengajaran subuh anak-anak yang ikut shalat berjama'ah di Masjid Muhammadan pasar Batipuh Padang selatan pada tahun 1964 yang materinya ayat, hadist, bernyanyi, dan bersajak. Pengajaran subuh itu mendapat perhatian banyak orang kemudian dikembangkan pengajarannya tidak hanya pada waktu subuh, namun demikian waktu subuh tetap menjadi ciri khasnya karena waktu subuh dipandang urgen untuk ibadah, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Kader Didikan Subuh adalah anak-anak dan remaja yang muqim disekitar masjid dan mushalla tempat diadakan Didikan Subuh, biasanya mereka adalah murid-murid TPA/TPSA dan MDA yang disebut kader tingkat Ula (dasar), kader Wushta (menengah) yaitu remaja setingkat SMP dan 'Ulya (mahir) adalah remaja setingkat SMA.

Pembina Didikan Subuh adalah orang-orang yang peduli dengan pendidikan agama yang muqim di sekitar masjid/mushalla tempat diadakan Didikan Subuh biasanya mereka adalah guru TPA/TPSA dan MDA. Didikan Subuh diurus oleh Lembaga Didikan Subuh yang berjenjang dari level Masjid/Mushalla, nagari, kecamatan, kabupaten sampai kepada pengurus pusat yang baru berkedudukan di propinsi di Sumatera Barat.

Sejak awal pembinaannya Didikan Subuh mengidentikkan diri sebagai gerakan keagamaan dan kaderisasi yang tidak memihak kepada suatu organisasi Islam dan mazhab apapun. Dalam kalimat “Didikan Subuh” tercakup beberapa aspek yaitu lembaga, program, kegiatan, gerakan dan kader.

Dengan latar belakang tersebut, dirasa perlu pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan kegiatan Didikan Subuh dengan menyelenggarakan kegiatan Penilaian Didikan Subuh Berprestasi Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan Penilaian Didikan Subuh Berprestasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dilaksanakan dimulai Minggu 3 Maret s/d 26 Agustus 2018. Kategori/Indikator penilaian dengan materi :

a. Penampilan Wajib dengan bobot penilaian 50%

Penampilan Wajib ini meliputi :

- Pembawa acara
- Bacaan AlQuran dan terjemahan
- Pengumandangan Azan Subuh
- Pembacaan Janji Didikan Subuh
- Hafalan Ayat pendek dan Hadis Populer
- Kultum
- Praktek Sholat Jenazah
- Dialog Interaktif dengan Tim Juri
- Pembacaan Doa
- Acara Seremonial lainnya

b. Penampilan Tambahan dengan Bobot Penilaian 30 %

Penampilan Tambahan antara lain :

- Penampilan Nasyid
- Pembacaan Puisi
- Pembacaan Asmaul Husna
- Petatah Petitih Adat Minangkabau
- Penampilan lainnya

c. Profil LDS Bobot Penilaian 10% (Profil tidak dipresentasikan)

d. Partisipasi Lingkungan Bobot Nilai 10%

Berdasarkan kriteria dan kategori penilaian tersebut, kemudian akan ditentukan pemenang yang ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur dan diberikan hadiah. Pada Tahun 2018 telah ditetapkan Lembaga Didikan Subuh Berprestasi Sumatera Barat dengan Penetapan Surat Keputusan Nomor : 460-1164-2018 Tanggal 25 November 2018 Tentang Penetapan Pemenang Penilaian Didikan Subuh Berprestasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, sebagai berikut :

No.	Nama Lembaga	Pemenang	Besaran Penghargaan	Jumlah
1	TPQ/MDTA Nurul Islam Kel. Ekor Lubuk Kec P.Panjang Timur Kota Padang Panjang	I	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
2	MDA Nurul Yakin Taratak Baru Kapau Kec Pauh Duo Kab. Solok Selatan	II	Rp. 8.000.000,-	Rp. 8.000.000,-
3	MDT Mushalla Jami'atul Khairat Kel. Teluk Kabung Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang	III	Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
4	TPA Masjid Baiturrahim Kec. Basa Ampek Balai Tapan Kab Pesisir Selatan	IV	Rp. 4.500.000,-	Rp. 4.500.000,-
5	TPQ Baitul Amal Masjid Baitul Ikhlas Nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX Kab Lima Puluh Kota	V	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-

Penyerahan Hadiah kepada Pemenang Penilaian Subuh Berprestasi Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada Tanggal 23 November 2018 bertempat di Masjid Raya Sumatera Barat yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H.

- ✚ **Sasaran 3** : Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi SDM dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan

Indikator : Persentase Terbentuknya Tim Pembina dan Sekretariat TP UKS/M

Sebagai Pembina, Koordinator dan pelaksana program UKS di daerah, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pusat, provinsi dan Kab/Kota merupakan fungsi dari Tim Pembina UKS Kab/Kota. Sedangkan tugas yang harus dilakukakan oleh TP UKS Kab/Kota adalah :

1. melakukan koordinasi penyusunan perencanaan, sarana dan prasarana, SDM dan Dana
2. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan UKS
3. Melakukan pembinaan dan pengembangan TP UKS Kecamatan dan sekolah
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas bidang UKS dengan instansi di daerah yang secara fungsional memiliki keterkaitan kerja.
5. Melakukan rapat kerja minimal 1 kali setahun

Indikator penguatan TP UKS Kab/Kota adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan TP UKS dengan SK Bupati atau Walikota
2. Pembentukan sekretariat TP UKS beserta kelengkapan sarana prasarana
3. Keterlibatan lintas sector dalam UKS
4. Dukungan dana dari APBD
5. Ada program dan kegiatan
6. Pembinaan ke TP UKS Kecamatan secara berkesinambungan
7. Dokumen pelaksanaan kegiatan
8. Pelaporan tahunan pelaksanaan pembinaan

Dari indikator dan tugas yang harus dilaksanakan oleh TP UKS tadi dapat diukur tingkat keaktifan sebuah TP UKS. Berdasarkan hal tersebut sampai saat ini dapat dihitungkategori cukup, baik dan sangat baik adalah sebanyak 18 kab/kota dari 19 Kab/Kota di Sumatera Barat atau 57,8% dan untuk TP UKS Kecamatan sebanyak 126 TP UKS Kecamatan atau sebesar 70,39%.

- ✚ **Sasaran 3** : Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi SDM dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan

Indikator : Jumlah Guru TPQ/MDT yang dilatih

Pembinaan terhadap anak-anak maupun remaja untuk mencintai Al Qur'an di Sumatera Barat belakangan ini sangatlah tinggi, ini dibuktikan melalui data yang terdapat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Setiap tahunnya selalu ada peningkatan jumlah lembaga TPQ dan MDTA bahkan untuk daerah kepulauan mentawai juga mengalami pertumbuhan jumlah TPQ dan MDTA, hal ini seharusnya dibarengi oleh peningkatan kualitas pengajar dalam hal ini kualitas guru yang mengajar. Oleh karena itulah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Guru TPQ/MDTA se Sumatera Barat Tahun 2017. Pelaksanaan kegiatan tersebut dibagi pada kota padang tanggal 20 s/d 22 Maret 2018 dan dua kali kegiatan mentawai di Tua Pejat tanggal 9s/d 11 April 2018 di Muara Siberut 24 s/d 26 April 2018 dengan jumlah peserta berjumlah 90orang. Pelaksanaan di padang sebanyak 50 orang dan pelaksanaan mentawai sebanyak 40 orang 20 orang masing-masing lokasinya.

✚ **Sasaran 3** : Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi SDM dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan

✚ **Indikator** : Jumlah pengurus rumah ibadah yang di latih.

Pengelolaan Rumah Ibadah umat Islam (Masjid dan Mushalla) saat ini masih mengenyampingkan prinsip-prinsip manajemen, hal ini disebabkan oleh karena pemanfaatan masjid/ mushalla penggunaannya cenderung hanya pada ritual agama saja. Dalam kajian manajemen modren masjid merupakan organisasi yang pengelolaannya harus berprinsip pada transparansi, akuntabilitas namun tetap memegang teguh nilai-nilai kebersamaan.

Sebagai organisasi, Masjid memerlukan sistem pelaporan baik tentang pengelolaan uang atau barang yang efektif dan akurat karena pengelolaan keuangan/barang Masjid yang baik merupakan faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dalam memakmurkan Masjid.

Di Sumatera Barat sistem pengelolaan keuangan masjid sebagian besar masih menggunakan sistem pembukuan tunggal, pencatatan transaksi keuangan tidak dilaksanakan melalui siklus pembukuan, pengklasifikasian dan pengihtisaran. Laporan keuangan yang dibuat masih menggunakan pendekatan anggaran atau akuntansi dana, yang melaporkan tentang penggunaan dana serta saldo

setiap bulan. Penyajian informasi keuangan Masjid masih menggunakan 2 cara yaitu pengumuman setiap jumat dan ditempel pada papan informasi Masjid.

Mengingat tingkat urgesi dalam pengelolaan keuangan dan barang tersebut maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan Pelatihan terhadap pengurus Masjid dalam bentuk Bimtek pengelolaan uang dan barang yang dilaksanakan dalam 2 angkatan yaitu pada tanggal 15 s/d 16 Maret 2018 yang dihadiri 87 orang Pengurus masjid sebagai peserta dan tanggal 13 s/d 14 Agustus 2018 dengan jumlah peserta 87 orang pengurus Masjid.

✚ **Sasaran 3** : Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi SDM dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan

✚ **Indikator** : Jumlah Guru Pondok Alquran yang dilatih.

Peranan Pondok Alquran di Sumatera Barat sangat besar dalam melahirkan Qori/Qoriah yang berprestasi di ajang MTQN Tingkat Nasional, sehingga mutu pengajaran yang diberikan oleh pondok Alquran sangat mempengaruhi mutu didikan.

Salah satu cara untuk meningkatkan mutu Pondok Alquran tadi adalah dengan meningkatkan mutu guru pondok, pelatihan yang diberikan kepada guru-guru Pondok disesuaikan dengan spesialisasi yang dimiliki oleh guru tersebut. Pelatihan yang diberikan kepada guru-guru tersebut antara lain seperti Tilawah, Tahfizh, Tafsir dan Khat.

Narasumber yang memberikan pelatihan kepada Guru Pondok Alquran merupakan Narasumber yang memiliki kompetensi yang baik pada bidang yang dilatihnnya, narasumber yang didatangkan berasal dari pusat dan daerah.

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pondok Al-Qur'an se Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 8 Maret 2018 bertempat di Hotel Kharisma Bukittinggi dengan jumlah peserta sebanyak 90 peserta dan dilatih oleh 6 narasumber pusat dan 6 narasumber daerah. Dengan peserta sebanyak 90 orang berarti telah mencapai target jumlah guru pondok Alquran yang dilatih yaitu sebanyak 90 atau 100%.

✚ **Sasaran 4** : Terwujudnya koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan.

Indikator 1 : Persentase hasil rumusan rapat koordinasi yang ditindaklanjuti

Pelaksanaan rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap tahunnya di Biro Bina Mental dan Kesra bertujuan untuk menghimpun serta mencari jalan keluar terhadap suatu permasalahan. Melalui rapat koordinasi biasanya tercipta suatu konklusi pengambilan kebijakan baik kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang sudah ada maupun antisipasi terhadap permasalahan yang akan muncul.

Kegiatan Rakor yang dilaksanakan oleh Biro Bina Mental dan Kesra antara lain :

1. Kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat.
2. Koordinasi dan Fasilitasi penanganan masalah sosial.
3. Kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS
4. Kebijakan Penanganan Bencana dan Pasca Bencana
5. Kebijakan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa

Setiap hasil rakor telah disampaikan ke Kab/kota untuk dilaksanakan. Dan telah dilaksanakan juga monitoring terhadap hasil rakor, dan melalui monitoring dapat diketahui bahwa telah dilaksanakan sesuai dengan rumusan hasil pelaksanaan rakor.

 **Sasaran 5** : Terwujudnya peningkatan pengelolaan organisasi yang baik

Indikator 1 : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan.

Perencanaan Stratejik merupakan Suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghsilkan suatu rencana statejik yg memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program , kebijakan, sasaran yang telah

ditetapkan dalam rencana strategik. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan.

Pencapaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Adalah B dengan Target Penetapan Kinerja adalah sebesar Nilai B atau dengan persentase capaian 100 % dari terget.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pelaksanaan Program Kegiatan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 yang mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja yang dicapai adalah sebagai berikut :

1. Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial.

Capaian Program : Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi di Bidang Kesejahteraan Sosial (100%) meliputi :

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Input : Dana (Rp. 558.841.000,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 522.265.299,- (93.46%).

Output : Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tahun 2018 dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya pemahaman dan penerapan pola hidup bersih dan sehat (100%).

b. Kegiatan Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS

Input : Dana (Rp. 186.214.000,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 127.223.004,- (92.49%).

Output : Rapat Koordinasi Penanggulangan HIV dan AIDS dengan realisasi fisik 100%.

Outcomes : Meningkatnya koordinasi Penanggulangan HIV dan AIDS dengan ralisasi (100%).

c. Kegiatan Rapat Kerja Daerah Tim Pembina UKS tingkat Provinsi Sumatera Barat

Input : Dana (Rp. 128.009.000,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 94.305.500,- (73.67%).

Output : Rapat Kerja Daerah Tim Pembina UKS tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dengan realisasi 100%.

- Outcomes** : Meningkatnya Pemahaman Tim Pembina Dalam Pembinaan dan Pengembangan UKS di Provinsi Sumatera Barat (100%).
- d. Kegiatan Kebijakan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
- Input** : Dana (Rp. 116.028.300,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 86.406.640,- (74.47%).
- Output** : Terlaksananya 1 kali rapat koordinasi dan fasilitasi KLB dengan realisasi 100 %.
- Outcomes** : Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi KLB (100%)
- e. Kegiatan Kebijakan Penanganan Bencana dan Pasca Bencana
- Input** : Dana (Rp. 138.598.770,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 124.270.500,- (89.66%).
- Output** : Terlaksananya 1 kali rapat koordinasi dan fasilitasi bidang Bencana dan Pasca Bencana dengan realisasi 100 %.
- Outcomes** : Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi bidang bidang Bencana dan Pasca Bencana (100%)
- f. Kegiatan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat
- Input** : Dana (Rp. 110.470.000,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 101.056.150,- (91.48%).
- Output** : Terlaksananya 1 kali rapat koordinasi dan fasilitasi bidang dengan realisasi 100 %.
- Outcomes** : Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi bidang kesmas (100%).
- g. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Masalah Sosial
- Input** : Dana (Rp. 142.662.800,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 118.862.447,- (83.32%).
- Output** : Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah sosial melalui seminar dengan realisasi 100%.
- Outcomes** : Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah sosial dengan pejabat lintas sektor kab/kota (100%).

2. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama.

Capaian Program : Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pelayanan kehidupan beragama di padang (Sumatera Barat) (100%) meliputi:

- a. Kegiatan Koordinasi Pelayanan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji di Padang.

Input : Dana (Rp. 1.989.371.500,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 1.842.633.998,- (92.62%).

Output : Terselenggaranya koordinasi dalam rangka pelayanan Embarkasi Haji di Padang dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya kualitas pelayanan Haji di Embarkasi Haji Padang (100%).

- b. Kegiatan Dukungan Terhadap Pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat.

Input : Dana (Rp. 5.240.616.100,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 5.240.616.100,- (100%).

Output : terselesaikannya pembangunan fisik Masjid Raya Sumatera Barat dengan realisasi 100%.

Outcomes : Partisipasi masyarakat untuk membantu pembangunan Masjid Raya (100%).

- c. Pembangunan Interior Masjid raya Sumbar dan Penyelesaian Pembangunan Menara Masjid Raya Sumbar

Input : Dana (Rp. 12.000.000.000,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 11.523.991.800,- (96.03%).

Output : Terselenggaranya Pembangunan interior dan pembangunan menara Masjid Raya Sumatera Barat

Outcomes : Lancarnya pelaksanaan ibadah serta kegiatan lainnya di masjid Raya Sumbar (100%).

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Masjid Raya.

Input : Dana (Rp. 1.711.883.653,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 1.395.645.785,- (81.53%).

Output : Terselenggaranya pelayanan keamanan dan kebersihan Masjid Raya Sumatera Barat

Outcomes : Lancarnya pelaksanaan ibadah serta kegiatan lainnya di masjid Raya Sumbar (100%).

3. Program Peningkatan, Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama.

Capaian Program : Meningkatnya koordinasi pemahaman, penghayatan dan pengembangan nilai keagamaan di Sumatera Barat (100%) meliputi:

a. Kegiatan Penilaian Didikan Subuh Berprestasi Provinsi Sumatera Barat.

Input : Dana (Rp. 263.575.940,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 254.531.475,- (96.57%).

Output : Terbinanya 19 lembaga Didikan Subuh di Kabupaten/Kota dan tersalurkannya bantuan untuk lembaga Didikan Subuh dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya prestasi binaan lembaga Didikan Subuh se Sumatera Barat (100%).

b. Kegiatan Pencerahan Agama dan Silaturahmi Bulan Ramadhan

Input : Dana (Rp. 505.573.000,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 453746256,- (89.75%).

Output : Terselenggaranya kunjungan Tim Ramadhan ke 147 Mesjid yang ada di 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya hubungan silaturahmi di Bulan Ramadhan di Mesjid-mesjid se Sumatera Barat (100%).

c. Kegiatan Wirid/Ceramah Agama Mingguan PNS di Lingkungan Kantor Gubernur.

Input : Dana (Rp. 104.375.674,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 78.082.134,- (74.81%).

Output : Terselenggaranya wirid pengajian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama 48 minggu dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya ke Imanan dan ke Taqwaan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (100%).

- d. Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam di Lingkungan Kantor Gubernur.

Input : Dana (Rp. 99.185.300,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 84.726.750,- (85.42%).

Output : Terselenggaranya acara peringatan hari besar Islam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk 4 kali kegiatan dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya pemahaman PNS terhadap makna hari-hari besar Islam (100%).

- e. Kegiatan Pelatihan Qori/ah, Mufasir/ah dan Hafiz/ah Sumatera Barat.

Input : Dana (Rp. 351.132.350,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 298.025.600,- (84.88%).

Output : Terselenggaranya pelatihan terhadap Kafilah potensial Sumatera Barat dengan 48 orang peserta, dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya prestasi calon-calon Kafilah pada event-event tingkat Nasional (100%).

- f. Kegiatan Pengiriman Kafilah Sumatera Barat Dalam Rangka MTQ Nasional.

Input : Dana (Rp. 3.121.527.435,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 2.803.948.226,- (89.83%).

Output : Tersedianya persiapan dan pengiriman Kafilah Sumatera Barat ke ajang STQ Nasional dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya prestasi Sumatera Barat pada Ajang STQ Nasional (100%).

- g. Kegiatan Pelatihan Qiraatil Khutub Sumatera Barat

Input : Dana (Rp. 210.436.050,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 188.257.800,- (89.46%).

Output : Terselenggaranya Pelatihan kepada Calon kafilah Potensial sumbar .

Outcomes : Meningkatnya kemampuan kafilah sumbar (100%).

- h. Pengembangan Tilawatil Quran se Sumatera Barat

- Input** : Dana (Rp. 451.705.150,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 420.494.150,- (89.46%).
- Output** : Terselenggaranya Pengembangan Tilawatil Quran di Sumatera Barat.
- Outcomes** : Meningkatnya Kompetensi Dewan Hakim(100%).

4. Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan.

Capaian Program : Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan di Sumatera Barat (100%) meliputi:

a. Kegiatan Pelatihan Guru TPQ/MDTA se Sumatera Barat.

- Input** : Dana (Rp. 200.766.542,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 197.137.900,- (98.19%).
- Output** : Terselenggaranya pelatihan terhadap Guru TPQ/MDT se Sumatera Barat dengan 50 orang peserta untuk di padang dan 40 orang peserta di Mentawai dengan realisasi 100%.
- Outcomes** : Meningkatnya motivasi guru TPQ/MDT untuk membina prestasi didik di daerah (100%).

b. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang/Uang Pengurus Rumah Ibadah.

- Input** : Dana (Rp. 265.801.550,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 248.919.850,- (93.65%).
- Output** : Terselenggaranya pelatihan terhadap pengelola barang/uang pada rumah ibadah se Sumatera Barat dengan 174 orang peserta dengan realisasi 100%.
- Outcomes** : Meningkatnya kualitas pengelola barang/uang pada rumah ibadah se Sumatera Barat (100%).

c. Kegiatan Koordinasi Bidang Keagamaan di Sumatera Barat.

- Input** : Dana (Rp. 130.415.200,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 113.795.000,- (87.26%).

Output : Terwujudnya sinergitas program kegiatan bidang keagamaan dengan realisasi 100%.

Outcomes : Mempercepat pembangunan bidang keagamaan di Sumbar (100%).

d. Kegiatan Pembinaan Pondok Alquran se Sumbar

Input : Dana (Rp. 337.240.800,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 305.199.100,- (90.50%).

Output : Terselenggaranya fasilitasi pembinaan kepada guru pondok Al Quran dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya prestasinya binaan pondok alquran se Sumatera Barat (100%).

e. Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan kegiatan imam masjid

Input : Dana (Rp. 694.967.700,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 652.293.424,- (93.85%).

Output : Terselenggaranya pelatihan kepada imam masjid se Sumatera Barat dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya motivasi imam masjid untuk membina umat islam di daerah (100%).

BAB IV

Penutup

Bab ini secara umum menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

4.1 Kesimpulan

LAKIP Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2018 berdasarkan Rencana Strategik (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. LAKIP Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan realisasi program kegiatan bidang-bidang di lingkungan Biro Bina Mental dan Kesra.

Dengan demikian LAKIP Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Biro Bina Mental dan Kesra secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LAKIP dari bidang-bidang dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap bagian berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Lima Tahunan Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021. Program-program tersebut meliputi Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama, Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan, Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial.
2. LAKIP Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

4.2 Saran

Untuk peningkatan capaian kinerja sebagai saran adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pencapaian kinerja program kegiatan di lingkungan Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilakukan antara lain melalui :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
 - b. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang akan menjalankan program kegiatan di lingkungan Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Januari 2019
Plt. KEPALA BIRO BINA MENTAL DAN KESRA

Liza Jalinus, SH, M.Si
Pembina Tk. I,
Nip. 19650515 198801 2 004